

HEGEMONI KEKUASAAN DALAM PARADIGMA POLITIK PEMBERDAYAAN LOKAL KAIN TENUN DI KABUPATEN ENDE

Oleh :

Maximianus Ardon Bidi¹⁾, Frans Bapa Tokan²⁾, Yohana Fransiska Medho³⁾
^{1,2,3} Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

¹email: bidimaximianus@gmail.com

²email: frans.fisipunwira@gmail.com

³email: yohanamedho@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat Artikel :

Submit, 10 Nopember 2023

Revisi, 10 Januari 2024

Diterima, 19 April 2024

Publish, 15 Mei 2024

Kata Kunci :

Hegemoni Kekuasaan,
Politik Pemberdayaan.

ABSTRAK

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan, pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. Modus operandi terhadap perwujudan esensi pemberdayaan ditunjukkan dengan beberapa pendekatan salah satunya adalah melalui hegemoni dalam mewujudkan pemberdayaan yang optimal seperti yang dikaji melalui penelitian ini yaitu: Hegemoni Kekuasaan Dalam Paradigma Politik Pemberdayaan Lokal Kain Tenun Di Kabupaten Ende, tujuannya adalah mendeskripsikan disintegrasi kepentingan elit dalam kerangka hegemoni dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, dalam ruang lingkup politik pemberdayaan lokal kain tenun di Kabupaten Ende terdapat hegemoni yang dibangun berdasarkan kebijakan dan dorongan kekuasaan untuk menggerakkan program pemberdayaan yang meliputi kewenangan pemerintah dan swasta untuk melakukan distribusi sumber daya, serta masyarakat sebagai subyek atau sasaran terhimpun dalam trikotomi pemberdayaan. rujukan dan rekomendasi dari kajian ini adalah usaha mengoptimalkan pemberdayaan dengan menciptakan ruang kondusif serta memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai sasaran pemberdayaan agar tidak terjadi eksploitasi sumber daya sehingga masyarakat dapat berkembang, mandiri, dan berdaya.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license



Corresponding Author:

Nama: Maximianus Ardon Bidi

Afiliasi: Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Email: bidimaximianus@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya, tetapi dalam kenyataannya masih ada kesenjangan yang belum dapat dipecahkan salah satunya kemiskinan. Oleh karena itu program pemberdayaan masyarakat dapat dijadikan sebagai sebuah strategi kebijakan atau usaha pemerintah dengan memperkuat kapasitas masyarakat agar

mampu mewujudkan dan meningkatkan harkat serta martabat masyarakat setempat, termasuk di dalamnya menanggulangi kemiskinan (Saharuddin, 2009).

Dalam dinamika pembangunan dan pemberdayaan di Indonesia cukup dipengaruhi oleh beberapa sistem seperti keterlibatan aktor, mekanisme apa yang dipergunakan, dan ideology apa yang mendasarinya. Sistem klasifikasi ini kemudian dipergunakan untuk menganalisis dinamika kebijakan

ekonomi politik dalam kaitannya dengan kebijakan dan pemberdayaan masyarakat yang secara garis besar dapat diidentifikasi dengan menggunakan tiga pola (Mas'ood, 1994): Politik sebagai panglima, ekonomi sebagai panglima, dan moral sebagai panglima.

Konsep pemberdayaan masyarakat yang berlandaskan partisipasi tentunya sangat tidak realistis apabila kekuatan ekonomi dan struktur-struktur diluar masyarakat diabaikan, sebab pemberdayaan masyarakat tidak hanya sebatas ekonomi tetapi juga politik sehingga masyarakat memiliki daya posisi tawar (Bergaining Position).

Konteks pemberdayaan memerlukan penguatan seperti hubungan dan relasi aktor yang terlibat di dalam proses pemberdayaan (Maani, 2011). Dalam proses ini pemberdayaan dimanfaatkan sebagai komponen penguat dalam mencapai tujuan dengan menggunakan trikotomi peran antara pemerintah, swasta, dan masyarakat/LSM berdasarkan kesatuan kepentingan tanpa ada dominasi yang bersifat eksploitatif antara satu pihak dengan pihak yang lain.

Sejalan dengan trikotomi pendekatan diatas terdapat tiga pandangan tentang politik yang koheren dengan paradig ekonomi yang digunakan dalam pendekatan pemberdayaan meliputi; Politik sebagai pemerintahan, berkenaan dengan mekanisme politik formal dari sebuah negara secara keseluruhan yaitu semua intitusi, undang-undang, kebijakan publik dan pelaku-pelaku utama dalam pemerintahan.

Pendekatan Politik sebagai kehidupan public, memiliki cara pandang tentang ekonomi dan politik, yaitu ekonomi terkait dengan urusan pribadi dan politik berkenaan dengan urusan public atau masyarakat secara umum. Sedangkan politik sebagai alokasi nilai dari pihak yang berwenang (Levine J. A., 2018). Memandang bahwa politik dan ekonomi memiliki kesamaan yaitu, keduanya memiliki sama-sama merupakan metode aksi dan yang membedahkan hanya terletak pada cara pandang dan aksi, dimana politik memiliki fokus pada distribusi sumber daya, sedangkan ekonomi pada pertukaran secara sukarela.

Tiap-tiap pendekatan ini memiliki wilayahnya masing-masing dan memiliki pandangan sendiri tentang politik dan sering kali memiliki aturan sendiri tentang apa yang ada diluar wilayah politik akan tetapi ketiga tersebut merupakan sebuah komponen yang berkonsentrasi pada sebuah tataran dengan premis bahwa interaksi baik diluar maupun dalam wilayah pemerintahan, sejauh berkenaan dan menyentuh dengan regulasi dan memiliki hubungan dengan alokasi yang diberikan oleh pihak berwenang, maka hal tersebut dapat dimasukkan ke dalam konsep sistem politik seperti yang dijabarkan pada jaringan dan akomodasi kerja program pemberdayaan kabupaten Ende dibawah ini:



Dalam dinamika pemberdayaan konsep hegemoni kekuasaan kemudian digunakan untuk menjembatani pelaksanaan tindakan pemerintah dengan trikotomi pemberdayaan antara pemerintah, hubungan dan relasi aktor, dengan komunitas lokal agar terlibat secara partisipatif dalam pemberdayaan karena konsep hegemoni yang digunakan disini bukan merupakan konsep hegemoni yang radikal akan tetapi menekankan konsep hegemoni dengan karakter humanis. Dimana Gramsci dalam kritik terhadap pembangunan dunia ketiga menekankan bahwa hegemoni kekuasaan harus dilakukan dengan menginternalisasi nilai-nilai serta norma penguasa (Sugiono, 2006)

Sebabnya paradigma hegemoni yang digunakan dalam pendekatan ini adalah paradig hegemoni positif untuk mendukung kualitas pemberdayaan masyarakat yang efektif. Menurut (Chambers, 1932) Konsep ini mencerminkan paradigma baru dari pembangunan, dimana dalam kerangka ini upaya untuk memberdayakan masyarakat dapat dikaji dari tiga aspek (Noor, 2011) sebagai berikut

1. Enabling yaitu menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang.
2. Empowering yaitu memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat melalui langkah-langkah nyata yang menyangkut penyediaan berbagai input dan pembukaan dalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat semakin berdaya.
3. Protecting yaitu melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Pendekatan pemberdayaan pada intinya memberikan tekanan pada otonomi pengambilan keputusan dari kelompok masyarakat yang berlandaskan pada sumberdaya pribadi, langsung, demokratis dan pembelajaran social.

Dalam dinamika pembangunan dan pemberdayaan di Indonesia cukup dipengaruhi oleh beberapa sistem seperti keterlibatan aktor, mekanisme apa yang dipergunakan, dan ideology apa yang mendasarinya. Sistem klasifikasi ini kemudian dipergunakan untuk menganalisis dinamika kebijakan ekonomi politik dalam kaitannya dengan kebijakan dan pemberdayaan masyarakat yang secara garis besar dapat diidentifikasi dengan menggunakan tiga pola

(Maso'ed, 1994) Politik sebagai panglima, ekonomi sebagai panglima, dan moral sebagai panglima.

Konsep pemberdayaan masyarakat yang berlandaskan partisipasi tentunya sangat tidak realistis apabila kekuatan ekonomi dan struktur-struktur diluar masyarakat diabaikan, sebab pemberdayaan masyarakat tidak hanya sebatas ekonomi tetapi juga politik sehingga masyarakat memiliki daya posisi tawar (*Bergaining Position*). Konteks pemberdayaan memerlukan penguatan seperti hubungan dan relasi aktor yang terlibat di dalam proses pemberdayaan (Maani, 2011).

Pendekatan ini dikuatkan dengan konsep ekonomi politik (Levine J. A., 2018) yang menempatkan politik sebagai alokasi nilai oleh pihak yang berwenang. Menurut pandangan ini, politik dan ekonomi memiliki kesamaan yaitu keduanya sama-sama merupakan metode alokasi dengan menggunakan dua cara alternatif, dimana politik dengan bentuk alokasi pembuatan keputusan dalam memproduksi dan mendistribusikan sumber daya. Sedangkan ekonomi yang menekankan pada pertukaran secara sukarela, maka sistem alokasi secara politis ini menekankan pada penggunaan kewenangan, karenanya pemerintah selalu memperhatikan masalah-masalah yang melibatkan masyarakat dalam berbagai bentuk tindakan kolektif.

Bentuk pemberdayaan tersebut kemudian ditunjukkan pada program pemberdayaan yang berbasis kearifan lokal seperti yang terjadi di Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kontribusi pemerintah Dalam proses pemberdayaan tertuang dalam kebijakan ekonomi dan pariwisata berupa aktualisasi, pengembangan dan pelestarian adat serta seni budaya daerah dengan implementasi programnya melaksanakan festival sepekan danau kelimutu yang menjadi momentum dalam pengembangan pariwisata dan produk wisata, dimana salah satunya adalah produk tenun.

Selain peran pemerintah sebagai administrator penggerak pemberdayaan, juga melibatkan korporasi sebagai pihak yang menunjukkan eksistensi mereka terlibat dalam kegiatan pembangunan masyarakat seperti Yayasan Insan Bumi Mandiri (IBM). Konsepsi yang dibangun pada aras kemitraan memiliki tujuan pada pelestarian terhadap budaya yang ada di masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), serta mengoptimalkan kearifan lokal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan mempertimbangkan pada alokasi sumber daya dan pembuatan keputusan ekonomi berdasarkan pertimbangan pasar sesuai dinamika permintaan dan penawaran.

(Easton, 1981) Memandang bahwa beberapa komponen diatas dapat dialokasikan dengan menggunakan kewenangan dimana ketiganya memiliki korelasi dengan pola kekuasaan, termasuk interaksi-interaksi di luar pemerintahan seperti keterlibatan pengusaha dalam pemberdayaan, sejauh mereka diregulasi dan memiliki hubungan dengan

alokasi yang diberikan oleh pihak yang berwenang maka kegiatan tersebut masuk atau terikat dalam sitem politik.

Program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur termuat dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) potensi pengembangan wilayah Kabupaten Ende, didasarkan pada karakteristik daerah diarahkan sesuai dengan strategi dan kebijakan pemanfaatan pola ruang sebagaimana yang telah ditetapkan pada perda No 11 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ende tahun 2011-2031 mencakup pemanfaatan potensi lokal terhadap pengembangan masyarakat.

Formulasi kebijakan pemberdayaan tersebut sebagai instrument yang digunakan oleh pemerintah melakukan kontrol sosial dan politik agar yang dikuasai mematuhi penguasa, yang dikuasai tidak hanya harus merasa mempunyai dan menginternalisasikan nilai-nilai serta norma penguasa, lebih dari itu mereka juga harus memberikan persetujuan atas subordinasi mereka.

Paradigma empiris hegemoni Gramsci secara signifikan menjadi kekuatan koersi, serta penetrasi negara termasuk pihak-pihak yang terlibat untuk mendorong suatu kelompok masyarakat dapat berkembang. Kegiatan ini secara masif hirarkis dilakukan mulai dari tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai pada scope kelompok lokal, dengan peran aktor melakukan distribusi sumber daya, memperluas pasar serta berimplikasi mewujudkan eksistensi nilai-nilai lokal masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai hegemoni kekuasaan dalam lingkaran trikotomi pemberdayaan yang melibatkan pemerintah, relasi aktor, dan pihak masyarakat yang terdampak pemberdayaan di Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur Berdasarkan tujuannya,

Menurut (Charswell, 2019) pendekatan penelitian studi kasus merupakan strategi penelitian di mana didalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitasnya, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data, maka paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme.

Dalam hal ini, paradigma konstruktivisme melihat fenomena "realitas" sebagai produk dan penciptaan kognitif manusia (Berger & Luckman) dalam (Hanitzsch, 2001) jenis dan sumber data yang diperoleh adalah data primer dan data sekunder melalui wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi, yang kemudian dianalisis melalui

reduksi data penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ruang Lingkup Hegemoni Politik Pemberdayaan Tenun Kabupaten Ende

Salah satu klasifikasi pemberdayaan adalah berbicara tentang aktualisasi pemberdayaan melalui kebijakan perencanaan yang dilakukan dengan cara mengembangkan atau mengubah struktur-struktur dan lembaga-lembaga untuk mewujudkan akses yang lebih adil kepada sumber daya atau berbagai layanan dan kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat.

Kebijakan aksi afirmatif atau diskriminasi positif mengakui keberadaan kelompok-kelompok yang dirugikan dan berupaya untuk memperbaiki keadaan dengan mengubah aturan-aturan untuk menguntungkan kelompok yang dirugikan, dengan cara memberikan sumber daya yang cukup dan aman kepada rakyat sebagai sebuah strategi pemberdayaan yang penting.

Masing-masing indikator tersebut merupakan ukuran kombinasi penilaian terhadap pelaksanaan program atau kebijakan oleh pemerintah dengan cara mengevaluasi pemanfaatan dari masing-masing indikator ditinjau dari aspek masyarakat sebagai sasaran kebijakan. Manifestasi yang nampak pada kebijakan pemberdayaan kelompok tenun Kabupaten Ende dapat menjelaskan keluaran-keluaran kebijakan seperti: pekerjaan, uang, materi, dan pelayanan dan distribusi sumber daya yang disediakan berdasarkan kemampuan untuk memperbaiki masalah-masalah sosial ekonomi masyarakat bertaraf lokal.

Pemberdayaan lokal yang dihasilkan melalui program pemberdayaan memiliki orientasi pada perwujudan peningkatan kesejahteraan dengan goals memperbaiki tingkat pendapatan terhadap kelompok terdampak pemberdayaan dengan rasionalitas yang diekspresikan melalui formulasi dan alokasi sumber daya dengan segmentasi aksi sebagai berikut.

1. Regulasi

Dalam program pemberdayaan regulasi dibuat untuk mengontrol cara orang berperilaku, juga sebagai proses untuk memastikan adanya standar sebagai suatu persyaratan hukum yang dipenuhi untuk kegiatan program pemberdayaan. Untuk melindungi kepentingan tenun kantor wilayah Kementrian Hukum dan Ham Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama pemerintah Kabupaten Ende melakukan koordinasi menetapkan legalitas berupa sertifikat indikasi geografis agar tenun terhindar dari klaim pihak yang tidak sah, serta pengarjin tenun merasa aman dalam melestarikan dan manfaat ekonomi produk tenun yang kemudian ditindaklanjuti oleh keputusan Bupati Nomor BU. 560/ BAPPEDA /881/ X/ 2021 Sebagai bentuk dukungan permohonan Perlindungan Indikasi Geografis Tenun Ikat Kabupaten Ende kepada Jendral Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan Ham RI

Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur.

2. Sumber Daya dan Sarana Prasarana Penunjang Kelompok Tenun

Dalam mendorong program pemberdayaan ketersediaan sumber daya menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan program, oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Ende selaku penyelenggara program, mengalokasikan sumber daya finansial dan bantuan pralatan serta membangun sentra-sentra industry tenun di beberapa desa dan kelurahan untuk mendukung program pemberdayaan.

3. Kelembagaan

Peran kelembagaan pada prrogram pemberdayaan kelompok penenun di Kabupaten Ende dinyatakan melalui peran dari pemerintah seperti; Dinas Perdagangan Kabupaten Ende, Dinas Koperasi dan UMKM, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, selain itu kontribusi Dewan Kerajinan Nasional Daerah dan pihak swasta seperti Insan Bumi Mandiri Bandung merupakan alternative merupakan akomodasi hegemoni pada level kelembagaan untuk mempengaruhi atau memotifasi kelompok pengrajin tenun untuk bertindak melalui distribusi sumber pengetahuan.

Hegemoni Kekuasaan Pemerintah Dalam Bentuk Kebijakan Pemberdayaan Tenun Kabupaten Ende

Pilihan pendekatan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 strategi pembangunan kabupaten dilaksanakan dengan memperhatikan masalah sebagaimana yang telah dirumuskan salah satunya pada pengembangan ekonomi melalui pemanfaatan pengembangan ekonomi sektor unggulan dan sektor potensial salah satunya pengembangan sektor industry tenun ikat Kabupaten Ende yang telah dilakukan pada beberapa wilayah di Kabupaten

Pemanfaatan tenun sebagai potensi lokal juga dilakukan secara menyeluruh di Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Surat Edaran Gubernur Nomor BO. 165/III/2019 Tentang Penggunaan Sarung Tenun Ikat Motif Daerah NTT. Regulasi ini sekaligus memberi stimulus dan keputusan mutlak bagi setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk memanfaatkan tenun sebagai produk dalam kebijakan program pemberdayaan.

Sedangkan pada tataran Kabupaten pendekatan pemberdayaan dipertegas melalui ketetapan yang dimuat dalam peraturan daerah Kabupaten Ende No. 11 Tahun 2011 Tentang Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ende Tahun 2011-2031 yang diarahkan kepada penguatan karakteristik wilayah Kabupaten Ende melalui pemanfaatan pola ruang yaitu keunggulan disetiap wilayah Kabupaten Ende, terdapat beberapa sektor yang dikembangkan menurut rencana wilayah salah satunya penguatan pada sektor Industri pada pengembangan industry tenun ikat yang sejalan dengan kebijakan pengembangan wilayah Nasional, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Program pemberdayaan kelompok tenun Kabupaten Ende adalah bentuk tindak lanjut peradaban yang sudah ada pada kelompok-kelompok dari tiga etnis yang terdapat dalam wilayah Kabupaten Ende seperti etnis Ende, Lio, dan Nage yang dimaksudkan untuk mengembangkan potensi usaha kecil dan menengah yang merupakan usaha ekonomi masyarakat Kabupaten Ende melalui wadah koperasi dan fungsi BUMDes sebagai penggerak utama ekonomi masyarakat desa serta pengembangan pasar sebagai pusat pemasaran produk usaha kecil, mikro, dan menengah yang digeluti oleh masyarakat salah satunya kegiatan usaha kelompok penun dengan penyebaran pada beberapa wilayah, setiap wilayah baik kecamatan, desa dan kelurahan memiliki masing-masing motif kain tenun yang berbeda.

Alternatif Pengembangan Tenun Untuk Mengangkat Potensi Lokal

Kegiatan menenun sudah diwariskan sejak dulu secara turun menurun. Pada awal kain tenun pertama yang digunakan adalah (Lawo Bitu dalam bahasa local) dimana Lawo Bitu pertama kali dibuat dengan benang yang dicampur dengan lumpur sehingga menciptakan sebuah motif dalam bahasa adat atau masyarakat lokal menyebutnya dengan “*Nggesu Kesu Rawi Embu Nggesu Ngere Pete Paru, Rawi Ngere Nana Wati*” mempunyai makna motif terbentuk dari ukiran-ukiran pada rumah adat yang mempunyai nilai magis dan nilai sakral.

Sebelum modernisasi pada umumnya kehidupan sehari-hari masyarakat Ende mengenakan tenun sebagai pakian adat serta pakian yang digunakan sehari-hari, dimana pakian adat yang digunakan pada saat upacara adat tentu berbeda dengan pakian yang digunakan sehari-hari dengan masing-masing model yang berbeda bagi kaum laki-laki dan perempuan seperti: Lawo/ Rawo (sarung untuk perempuan) dan Ragi Mite/ Luka Mite (Sarung yang dipakai kaum Pria).

Tenun ikat Ende-Lio berkaitan erat dengan tradisi, ritual adat, penghormatan terhadap sang pencipta, hajatan serta tradisi menenun tenun ikat Ende-Lio sebagai mata pencagarian untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Tenun Ikat Ende-Lio pada suku Ende-Lio berperan sebagai pakian kebesaran pada saat ritual/ upacara adat, Upacara penghormatan pada sang pencipta, seserahan saat hajatan, busana kebesaran, serta pakian perang suku.

Upaya mempertahankan eksistensi produk lokal tenun ikat Ende kemudian ditindak lanjuti melalui pelaksanaan program pemberdayaan kelompok penenun sesuai komitmen arah pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Ende tahun 2019-2024 yaitu: “Mewujudkan Karakteristik Kabupaten Ende dengan Membangun Dari Desa dan Kelurahan Menuju Masyarakat Yang Mandiri, Sejahtera, dan Berkeadilan.

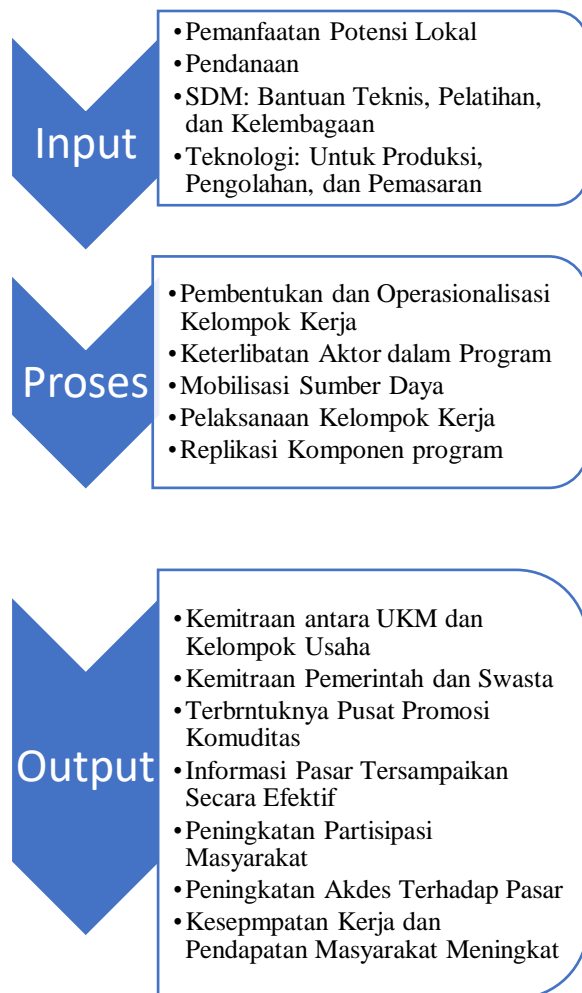
Urgensi persoalan pembangunan di Kabupaten Ende masih menjadi penyebab terjadinya kesenjangan

antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta antara apa yang ingin dicapai dimasa akan datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Salah satu permasalahan pokok dirumuskan berdasarkan telaahan capaian sasaran pokok RPJP, sasaran strategis RPJMD 2014-2019 dan target periode rencana yang disinergikan dengan platform kebijakan atau janji politik bupati dan wakil bupati 2019-2024 dengan rumusan persoalan seperti:

1. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia
2. Pertumbuhan ekonomi yang belum inklusif, kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat
3. Masih tingginya kesenjangan antar wilayah

Secara khusus kelemahan pengembangan sektor ekonomi belum memperhatikan aspek keunggulan komperatif dan keunggulan kompetitif sektor dengan penilaian bahwa, belum optimalnya pengembangan industri kecil dan koperasi secara profesional sehingga daya saing masih relatif rendah, keterbatasan akses modal dan pasar bagi kelompok usaha ekonomi yang masih terbatas, pasar sebagai pusat ekonomi masyarakat belum dikelola dengan baik, praktik dagang belum menjamin hak-hak konsumen (permainan harga pasar), masih terbatasnya hasil ekonomi masyarakat yang diekspor keluar daerah.

Mengetahui kendala sosial ekonomi yang terjadi di masyarakat, konsep pemberdayaan dapat dipandang sebagai penunjang yang memiliki manfaat untuk meningkatkan keswadayaan dan kesejahteraan masyarakat, karena ide utama pemberdayaan bersentuhan langsung dengan konsep mengenai modal sosial dan kekuasaan kemudian dihubungkan dengan kemampuan individu untuk membuat individu melakukan apa yang diinginkan terlepas dari keinginan dan minat mereka berdasarkan kekuatan tingkat individu dan sosial dengan implementasi menyangkut mobilisasi sumber daya lokal dan aset sebagai sara penunjang pemberdayaan seperti yang terlihat pada skema berikut ini.



Gambar 3.1 Skema Program Pemberdayaan Tenun Kabupaten Ende

Konvensionalisasi Hegemoni Dalam Bentuk Kemitraan Pada Program Pemberdayaan

Pemberdayaan melalui kebijakan dan perencanaan dicapai dengan mengembangkan atau mengubas struktur-struktur dan lembaga-lembaga untuk mewujudkan akses yang lebih adil kepada sumber daya atau berbagai layanan dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat.

Kebijakan-kebijakan aksi afirmatif atau diskriminasi positif mengakui keberadaan kelompok-kelompok yang dirugikan dan berupaya memperbaiki keadaan dengan mengubah aturan-aturan untuk menguntungkan kelompok yang dirugikan termasuk mengubah mekanisme pekerjaan, mendorong pelibatan korporasi untuk mendukung kebijakan politik pemerintah.

Hal ini dapat dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Ende, sebagai salah satu alternatif dalam memenuhi kebutuhan pendanaan program dan kegiatan pembangunan melalui kerja sama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan sarana

dan prasarana yang seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian resiko antara para pihak, aktualisasi keterlibatan pihak swasta ditunjukkan melalui distribusi sumber daya berikut ini:

NO	Kebutuhan	Jumlah
A Sentra Peralatan		
1	Sentra tenun	90.000.000
2	Plang	1.000.000
3	Alat tenun	15.000.000
4	Bahan Baku	7.500.000
5	Listrik	1.200.000
6	Etalase dan display produk	5.000.000
7	Meja	2.000.000
8	Kursi	3.500.000
9	Rak	3.000.000
10	Mesin jahit	3.500.000
11	Mesin obras	5.000.000
12	Laptop	7.000.000
13	Handphone (ketua kelompok)	3.000.000
14	Speaker	2.000.000
15	Modem orbit pro	1.250.000
B Produk Development		
1	Project manager	18.000.000
2	Sewa Gerai	36.000.000
3	Riset Produk dan asesment	5.000.000
4	Branding dan marketing	10.000.000
C Launching		
1	Launching	10.000.000
2	Signatur Scraft PT SMF	5.000.000
3	Gift Undangan	5.000.000
	Total	238.950.000

Sumber: IBM Tenun.In 2020

Implementasi pembangunan di Kabupaten Ende selain dari APBD, juga diperoleh dukungan pendanaan dari APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Program Kemitraan Corporate social Responsibility yang dapat diperoleh melalui partisipasi aktif Pemerintah Kabupaten Ende untuk menjalin kerja sama kemitraan dengan organisasi dengan lembaga terkait sesuai amanat peraturan presiden Nomor 38 Tahun 2015 bahwa pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama dengan badan usaha (KPBU) dengan tujuan:

1. Mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam penyediaan infrastruktur melalui pengerahan dana swasta
2. Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran, dan tepat waktu
3. Menciptakan iklim investasai yang mendorong keikutsertaan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur berdasarkan prinsip usaha secara sehat.
4. Mendorong digunakanya prinsip penggunaan membayar pelayanan yang diterima, atau dalam hal tertentu mempertimbangkan kemampuan membayar pengguna
5. Memberikan kepastian mengambil investasi badan usaha dalam penyediaan infrastruktur melalui mekanisme pembayaran secara berkala oleh pemerintah kepada badan usaha.

Orientasi pelaksanaan kemitraan adalah menciptakan mutual benefit keuntungan bersama yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dengan proses pembiayaan.

Interpretasi alokasi anggaran pun dilaksanakan sebagai usaha mengetasi kesenjangan sosial melalui peran masing-masing elemen seperti pemerintah, swasta, pegiat tenun serta masyarakat terdampak program.

Dalam hal ini keterlibatan swasta dalam mendukung pemberdayaan di Kabupaten Ende ditunjukkan melalui alokasi dan distribusi sumber daya oleh Insan Bumi Mandiri sebagai satu kesatuan kekuatan hegemoni bersama pemerintah berlandaskan pada komitmen dan prinsip kerja sama melalui pendekatan Public Private Partnership yang berorientasi pada konsensus dan perjuangan kepentingan local community, kebaikan pihak swasta diinterpretasikan melalui distribusi sumber daya.

Rasionalisasi Dampak Pemberdayaan

Besarnya potensi dan ekosistem yang kuat dan meningkatkan nilai tambah tenun sebagai kerajinan bernilai tinggi mampu mengangkat nilai jual tenun apabila dibuat dari bahan-bahan berkualitas, perlu diketahui bahwa bahan unuk pembuatan tenun ikat Ende dibagi menjadi dua yaitu dari bahan kimia dan dari bahan yang bersumber langsung dari alam, sehingga menjadi pembeda dari segi harga dan kualitas dimana tenun yang berbahan dasar langsung dari alam memiliki nilai jual yang lebih tinggi.

Seiring berjalanya waktu dari manfaat distribusi pengetahuan dalam program pemberdayaan pengrajin tenun melihat dan mengamati apa yang menjadi keinginan konsumen dan kebutuhan serta perkembangan pasar, hal-hal tersebut kemudian menjadi dasar para pengrajin untuk lebih mengeksplorasi tenun agar tidak hanya dijadikan sebagai kain tenun tetapi berbagai macam produk seperti cindramata, tas, dompet, baju dan lain-lain.

Usaha mikro kecil tenun ikat di Kabupaten Ende tidak hanya dipandang sebagai objek potensial untuk menjaga eksistensi nilai budaya lebih dari pada itu memberikan manfaat terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan, tetapi memberikan peluang bagi perempuan masuk dalam dimensi dan kontribusinya dalam pembangunan dan perekonomian dengan capaian melalui penyerapan jumlah tenaga kerja seperti yang digambarkan pada tabel dibawah ini:

Penyerapan Jumlah Tenaga Kerja IKM Tenun ikat Kabupaten Ende

Kecamatan	Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja
Nangapanda	107.00
Pulau Ende	55.00
Maukaro	15.00
Ende	49.00
Ende Selatan	78.00
Ende Timur	60.00
Ende Tengah	35.00
Ende Utara	122.00
Ndona	104.00
Ndona Timur	13.00
Wolowaru	61.00
Wolojita	50.00
Lio Timur	-
Kelimutu	-
Ndori	50.00
Maurole	16.00
Kotabaru	-

Detukeli	-
Lepembusu Kelisoke	25.00
Detusoko	23.00
Wewaria	40.00
Jumlah	903.00

Sumber: BPS Kabupaten Ende 2019

4. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Hegemoni Kekuasaan Dalam Paradigma Politik Pemberdayaan Lokal maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa program pemberdayaan kelompok pengrajin tenun di Kabupaten Ende sebagai bagian dari proses dimana kelas dominan yang menjalankan kekuasaan dan kepemimpinan melalui mekanisme konsensus kesepakatan dan implementasi kebijakan.

Pelaku hegemoni yang terlibat dalam ruang lingkup pemberdayaan ini meliputi; Dinas Perdagangan Kabupaten Ende, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dewan Kerajinan Nasional Daerah, serta Korporasi yang ikut terlibat yaitu Insan Bumi Mandiri Bandung. Bentuk keterlibatan masing-masing lembaga ini berorientasi pada objektivisme kontekstual politik pemberdayaan lokal yaitu, peningkatan kesejahteraan ekonomi yang secara langsung ingin mempertahankan eksistensi produk lokal di tengah cengkraman globalisasi.

Implementasi dan kontribusi dari masing-masing lembaga terhimpun dalam sebuah koherensi berlandaskan pada identitas kekuasaan yang dimiliki untuk untuk menggerakkan kelompok yang dikuasai, dengan paham hegemoni yang digunakan dalam kajian pemberdayaan ini berdasarkan pada konvensionalisasi kearifan dengan perwujudan penguatan pemberdayaan berdasarkan aktualisasi konsep Chambers tentang paradigma pembangunan yaitu: *Enabling, Empowering, Protecting*.

Rekomendasi

Ruang lingkup hegemoni kekuasaan dalam kajian ini memusatkan pada jenis kekuasaan yang dikembangkan dan beroperasi dalam masyarakat, bentuk hegemoni teraktualisasi melalui kebijakan pemberdayaan dengan pelibatan aktor cenderung memikirkan agar entitas kekuasaan yang digunakan tidak mengeksploitasi masyarakat sebagai sasaran pemberdayaan.

Domain pemberdayaan yang terjadi memusatkan perhatian pada akselerasi aksi dan relasi antara para pemangku kepentingan, agenda pemberdayaan yang dikembangkan menjadi perhatian khusus dapat membawa perubahan terhadap subjek yang dikembangkan yaitu masyarakat lokal. Menciptakan ruang pemberdayaan yang kondusif, mempaukan masyarakat dapat berkembang, dengan dukungan partisipasi masyarakat yang aktif adalah parameter yang ingin dicapai dalam sebuah strategi pengembangan masyarakat.

Dalam konteks pengembangan lokal bagi kelompok tenun di Kabupaten Ende, tataran

pemberdayaan harus berada pada internalisasi etika positif pembangunan. Pengembangan masyarakat yang ditunjukkan melalui atribusi kekuasaan perlu memperhatikan ketepatan strategi, yang merujuk pada optimalisasi pengalokasian kekuasaan dan sumber daya, dengan goals dan indikator harus menunjukkan terjadinya perubahan atau peningkatan kualitas manusia tanpa adanya orientasi dan praktik penyimpangan kekuasaan dalam pemberdayaan masyarakat yang biasa disebut sebagai eksploitasi sumber daya.

5. REFERENSI

- Chambers, R. (1932). *Pembangunan Desa Mulai Dari Belakang*. Jakarta: LP3ES.
- Charswell, J. W. (2019). *Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Easton, D. (1981). The Political System Besieged By The State. *Political Theory*, 9(3).
- Hanitzsch, T. (2001). Teori Sistem Politik dan Paradigma Konstruktivisme: Tantangan Keilmuan Jurnalistik di Era Informasi. *ejournal.lunisba.ac.id*, 2(2), 218.
- Levine, J. A. (2018). *Teori-Teori Ekonomi Politik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Levine, J. A. (2018). *Teori-Teori Ekonomi Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Maani, K. D. (2011). Teori Actors Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Demokrasi*, 17, 27-34.
- Mas'oed, M. (1994). *Politik Birokrasi dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mas'oed, M. (1994). *Politik Birokrasi dan Pembangunan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Mas'oed, M. (1994). *Politik Birokrasi dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Noor, M. (2011). Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Civil*, 1(2).
- Saharuddin. (2009). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Kemanusiaan*, 3, 47-49.
- Sugiono, M. (2006). *Kritik Antonio Gramsci Terhadap Pembangunan Dunia Ketiga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.